

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara berkembang yang memiliki banyak permasalahan penduduk, salah satunya adalah pertumbuhan penduduk yang tinggi. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk pada bulan Agustus 2010 jumlah penduduk Indonesia ialah 237.556.363 jiwa, yang terdiri dari 119.507.580 laki-laki dan 118.048.783 perempuan dengan laju pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,49 persen per tahun, idealnya pertumbuhan penduduk Indonesia adalah 1,1 persen per tahun (Ari Sulistyawati, 2010: ii). Masalah pertumbuhan penduduk yang tinggi ini mempunyai implikasi yang luas terhadap pembangunan nasional, mulai dari pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, sandang, pangan dan papan hingga keamanan.

Pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan yang dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan kekuatan-kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Secara terus menerus penduduk akan dipengaruhi oleh jumlah bayi yang lahir, tetapi secara bersamaan akan dipengaruhi oleh kematian dan migrasi penduduk (Moh. Yasin, 2000: 5). Dengan demikian faktor pertumbuhan penduduk suatu negara atau wilayah akan ditentukan oleh, kelahiran, kematian, dan migrasi yang dilakukan oleh penduduk. Dalam hal ini kelahiran menjadi salah satu faktor penting yang menyebabkan tingginya laju pertumbuhan penduduk.

Untuk mengurangi laju pertumbuhan penduduk pemerintah telah menyusun suatu kebijaksanaan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Pengendalian penduduk ini merupakan kegiatan membatasi pertumbuhan penduduk, umumnya dengan mengurangi jumlah kelahiran. Kebijaksanaan kependudukan ini dikenal dengan program Keluarga Berencana (KB).

Program keluarga berencana ini dirintis sejak tahun 1951 dan terus berkembang, sehingga pada tahun 1970 terbentuklah Badan koordinasi keluarga berencana nasional (BKKBN). Program ini salah satu tujuannya adalah penjarangan kelahiran menggunakan metode kontrasepsi dan menciptakan kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi seluruh masyarakat melalui usaha-usaha perencanaan dan pengendalian penduduk (Ari Sulistyawati, 2010: 9).

Sejak pelita V, program keluarga berencana nasional berubah nama menjadi Gerakan Keluarga Nasional. Gerakan keluarga berencana nasional adalah gerakan masyarakat yang menghimpun dan mengajak segenap potensi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam melembagakan dan membudidayakan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS) dalam rangka meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia (Ari Sulistyawati, 2010: 10).

Dalam Undang-Undang RI No. 52 Tahun 2009 pasal 1 ayat 8 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dijelaskan bahwa Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Gerakan keluarga berencana mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya menurunkan angka kelahiran yang setiap tahunnya meningkat, pasangan usia subur (PUS) hendaknya mampu menjarangkan dan mengatur jarak kelahiran. Oleh karena itu, PUS baik istri maupun suami hendaknya dapat ikut berpartisipasi dalam gerakan keluarga berencana dalam membentuk keluarga kecil yang bahagia sejahtera dan dapat ikut berperan dalam pembangunan nasional.

Gerakan keluarga yang telah dilaksanakan selama empat dasawarsa telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya angka kelahiran total di Indonesia, dari 5,6 per wanita usia subur pada awal 70-an menjadi 2,6 pada tahun 2012 (SDKI, 2012). Keberhasilan keluarga berencana selama ini akibat baiknya partisipasi istri untuk ikut menjadi akseptor KB, berbeda dengan suami yang partisipasinya masih kurang untuk menjadi akseptor KB. Keluarga berencana merupakan tanggung jawab suami dan istri sehingga selain istri suami juga diharapkan partisipasinya untuk menjadi akseptor KB.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2009-2014 yang salah satu isinya meningkatkan kesertaan KB Pria menjadi 5% pertahunnya. Oleh karena itu, partisipasi suami sebagai akseptor KB dan menggunakan salah satu alat kontrasepsi seperti kondom ataupun vasektomi menjadi indikator penting dalam keberhasilan KB serta memberikan kontribusi yang nyata untuk mewujudkan NKKBS.

Partisipasi suami dalam keluarga berencana ini meliputi tanggung jawab sebagai peserta KB, berperilaku seksual yang sehat dan aman bagi dirinya, pasangan atau keluarganya. Keterlibatan pria dalam program KB dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Penggunaan metode kontrasepsi merupakan satu bentuk partisipasi suami secara langsung, sedangkan keterlibatan suami secara tidak langsung misalnya suami memiliki sikap yang lebih positif dan membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan sikap dan persepsi, serta pengetahuan yang dimilikinya.

Berdasarkan data Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012 dalam Rencana Aksi Nasional Pelayanan Keluarga Berencana, bahwa partisipasi pria dalam ber-KB secara nasional hanya mencapai 2,7% di antaranya 2,4% akseptor kondom dan 0,3% akseptor vasektomi. Hal ini mencerminkan bahwa partisipasi pria dalam ber-KB masih rendah jika dibandingkan dengan sasaran nasional pada tahun RPJMN 2009-2014 yaitu 5%.

Menurut BKKBN (2005), masih rendahnya partisipasi suami dalam pelaksanaan gerakan keluarga berencana ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- 1) Kondisi lingkungan sosial, budaya, masyarakat dan keluarga yang masih menganggap partisipasi pria belum atau tidak penting dilakukan.
- 2) Pengetahuan dan kesadaran pria dan keluarga dalam ber KB rendah.
- 3) Keterbatasan penerimaan dan aksesibilitas (keterjangkauan) pelayanan kontrasepsi pria.
- 4) Adanya anggapan, kebiasaan serta persepsi dan pemikiran yang salah yang masih cenderung menyerahkan tanggung jawab KB sepenuhnya kepada para istri atau perempuan.

Seperti halnya yang terjadi di Desa Tanjung Sari yang hanya 1,7 persen suami PUS yang ikut berpartisipasi menjadi akseptor KB. Desa Tanjung Sari adalah salah satu desa yang secara administratif merupakan bagian wilayah Kecamatan

Natar Kabupaten Lampung Selatan. Desa Tanjung Sari memiliki luas wilayah 11,00 Km² dengan jumlah penduduk 9.525 jiwa dengan jumlah PUS sebanyak 925 KK pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Setiap Dusun di Desa Tanjung Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2013.

No	Dusun	Akseptor		Non Akseptor		PUS	Persentase (%)
		F	%	F	%		
1	Tanjung Sari I	262	30,01	25	27,17	277	29,94
2	Tanjung Sari II	237	27,14	23	25	246	26,59
3	Tanjung Sari III	157	17,98	17	18,47	169	18,27
4	Tanjung Sari IV	85	9,73	11	11,95	94	10,16
5	Tanjung Sari V	132	15,12	16	17,39	139	15,02
Jumlah		873	100,0	92	100,0	925	100,0

Sumber: Data sekunder PLKB Natar Tahun 2013.

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa jumlah PUS yang terdapat di Desa Tanjung Sari adalah sebanyak 925 yang terdiri dari 873 PUS sebagai akseptor KB dan 92 PUS non akseptor KB.

Sebenarnya PUS di Desa Tanjung Sari ini sudah mengetahui adanya gerakan keluarga berencana, ini terlihat dari jumlah PUS yang telah ikut menjadi akseptor KB yaitu 873 jiwa akan tetapi dari banyaknya PUS yang telah menjadi akseptor KB masih di dominasi oleh para perempuan/istri. Hal ini ditunjukkan dengan sebanyak 850 akseptor KB yang menggunakan alat kontrasepsi adalah perempuan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa partisipasi suami dalam ber-KB atau penggunaan alat kontrasepsi masih rendah. Untuk lebih jelasnya mengenai partisipasi suami PUS dalam ber-KB di Desa Tanjung Sari saat ini dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah Akseptor KB Pria Menurut Alat Kontrasepsi di Desa Tanjung Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2013.

No	Alat Kontasepsi	Jumlah	Persentase (%)
1	MOP	16	1,2
2	Kondom	7	0,5
Jumlah		23	1,7

Sumber: Data sekunder PLKB Natar Tahun 2013

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa hanya 23 suami atau 1,7 persen suami PUS yang telah ikut berpartisipasi sebagai akseptor KB dengan menggunakan alat kontrasepsi yang diantaranya 0,5 persen akseptor kondom dan 1,2 persen akseptor vasektomi. Hal ini mencerminkan bahwa masih banyak suami PUS di Desa Tanjung Sari yang belum ikut serta dalam ber-KB dan menggunakan alat kontrasepsi. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi suami PUS di Desa Tanjung Sari sebagai akseptor KB masih rendah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas menunjukkan bahwa masih banyak suami PUS di Desa Tanjung Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan yang tidak berpartisipasi menjadi akseptor KB. Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang kajian rendahnya partisipasi Suami PUS Sebagai Akseptor KB di Desa Tanjung Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2014. Kajian dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan suami PUS tidak berpartisipasi sebagai akseptor KB.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa hal yang menjadi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Rendahnya tingkat pendidikan suami PUS
- 2) Rendahnya tingkat pengetahuan suami PUS tentang KB
- 3) Rendahnya tingkat pendapatan suami PUS
- 4) Positifnya persepsi suami PUS terhadap nilai anak
- 5) Negatifnya sikap suami PUS terhadap alat kontrasepsi
- 6) Jauhnya jarak tempat pelayanan KB

C. Batasan Masalah

Mengingat luasnya masalah yang ada, dan keterbatasan penulis maka dalam penelitian ini penulis membatasi masalah penelitian sebagai berikut :

- 1) Tingkat pengetahuan suami PUS tentang KB
- 2) Tingkat pendapatan suami PUS
- 3) Persepsi suami PUS terhadap nilai anak
- 4) Sikap suami PUS terhadap alat kontrasepsi
- 5) Jarak tempat pelayanan KB

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

- 1) Apakah rendahnya tingkat pengetahuan tentang KB menyebabkan suami PUS tidak berpartisipasi sebagai akseptor KB di Desa Tanjung Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan tahun 2014?
- 2) Apakah rendahnya tingkat pendapatan menyebabkan suami PUS tidak berpartisipasi sebagai akseptor KB di Desa Tanjung Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan tahun 2014?
- 3) Apakah persepsi yang positif terhadap nilai anak menyebabkan suami PUS tidak berpartisipasi sebagai akseptor KB di Desa Tanjung Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan tahun 2014?
- 4) Apakah sikap yang negatif terhadap alat kontrasepsi menyebabkan suami PUS tidak berpartisipasi sebagai akseptor KB di Desa Tanjung Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan tahun 2014?
- 5) Apakah jauhnya jarak tempat pelayanan KB menyebabkan suami PUS tidak berpartisipasi sebagai akseptor KB di Desa Tanjung Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan tahun 2014?

E. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mendapatkan informasi bahwa rendahnya tingkat pengetahuan menyebabkan suami PUS tidak berpartisipasi sebagai akseptor KB di Desa Tanjung Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan tahun 2014.

- 2) Untuk mendapatkan informasi bahwa rendahnya tingkat pendapatan menyebabkan suami PUS tidak berpartisipasi sebagai akseptor KB di Desa Tanjung Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan tahun 2014.
- 3) Untuk mendapatkan informasi bahwa persepsi yang positif terhadap nilai anak menyebabkan suami PUS tidak berpartisipasi sebagai akseptor KB di Desa Tanjung Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan tahun 2014.
- 4) Untuk mendapatkan informasi bahwa sikap yang negatif terhadap alat kontrasepsi menyebabkan suami PUS tidak berpartisipasi sebagai akseptor KB di Desa Tanjung Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan tahun 2014.
- 5) Untuk mendapatkan informasi bahwa jauhnya jarak tempat pelayanan KB menyebabkan suami PUS tidak berpartisipasi sebagai akseptor KB di Desa Tanjung Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan tahun 2014.

F. Kegunaan Penelitian

- 1) Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Geografi Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
- 2) Sebagai aplikasi Ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama di perguruan tinggi dengan fenomena yang terjadi di lapangan.
- 3) Hasil penelitian ini, diharapkan bermanfaat bagi pembaca dalam melakukan penelitian tentang penyebab rendahnya partisipasi suami PUS sebagai akseptor KB.

- 4) Sebagai suplemen materi pembelajaran dalam Ilmu Pengetahuan Sosial khususnya mata pelajaran Geografi pada kurikulum SMP kelas VII IPS Terpadu Semester ganjil pokok bahasan tentang permasalahan kependudukan di Indonesia.

G. Ruang Lingkup Penelitian

- 1) Ruang lingkup obyek penelitian adalah rendahnya partisipasi suami PUS sebagai akseptor KB di Desa Tanjung Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan tahun 2014.
- 2) Ruang lingkup subyek penelitian adalah suami PUS non akseptor KB dan minimal punya anak 1 di Desa Tanjung Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
- 3) Ruang lingkup tempat penelitian adalah di Desa Tanjung Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung.
- 4) Ruang lingkup waktu penelitian adalah tahun 2014.
- 5) Ruang lingkup ilmu yaitu Demografi.

Demografi mempelajari jumlah, persebaran, teritorial dan komposisi penduduk serta perubahan-perubahannya dan sebab-sebab perubahan itu, yang biasanya timbul karena natalitas (*fertilitas*), mortalitas, gerak teritorial (*migrasi*) dan mobilitas sosial (perubahan status) hal ini diungkapkan oleh Philip M. Hauser dan Duddley Duncan (1959) (dalam Ida Bagoes Mantra, 2003: 2).

Keluarga berencana merupakan program yang bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh perubahan-perubahan dinamika demografi salah satunya yaitu *fertilitas* (kelahiran).